

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini belum semua warga negara Indonesia bisa merasakan pendidikan yang layak, dengan berbagai penyebab. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi keluarga.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dana yang cukup. Menurut Peraturan Pemerintah No 48, tahun 2008, biaya pendidikan meliputi: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.

Masih menurut Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Masyarakat yang dimaksud PP tersebut adalah Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Biaya memiliki peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa didukung biaya yang memadai, proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, sehingga hasil pendidikan juga tidak maksimal. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen pendukung proses pendidikan yang sangat penting. Setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan terutama di sekolah tidak akan berjalan dengan baik.

Biaya (*cost*) pada pendidikan dasar dan menengah memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga .

Tahun 2004, telah diterbitkan UU no 32 tahun 2004 dan UU no 33 tahun 2004, tentang otonomi daerah, oleh pemerintah pusat. Dengan adanya UU no 32 tahun 2004 dan UU no 33 tahun 2004 ini, diharapkan dapat memacu kemajuan daerah sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membangun daerah di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Seiring pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pendidikan tidak lagi sentralistik, tetapi desentralistik.

Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen biaya pendidikan, terutama di daerah. Permasalahan tersebut dirasakan sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang juga meliputi bidang pendidikan. Masalah pembiayaan sangat menentukan kesuksesan program manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang saat ini diberlakukan transisi dengan pemberlakuan Kurikulum 2013.

Di Kabupaten Karanganyar, lewat Keputusan Bupati Karanganyar pada tahun 2014 diberlakukan program Sekolah Gratis. Pemberlakuan program sekolah gratis di Karanganyar diikuti dengan program pemberian bantuan operasional sekolah dari APBD yang dikenal dengan nama BOS Daerah. Program sekolah gratis di kabupaten Karanganyar berlaku untuk sekolah negeri dan sekolah swasta yang mampu menyelenggarakan sekolah bebas pungutan. Bagi sekolah swasta yang belum mampu menyelenggarakan sekolah bebas pungutan masih diperbolehkan memungut biaya dari orang tua/wali siswa sekedar untuk menutup kekurangan anggaran sekolah. Kebijakan ini diambil mengingat beban biaya antara sekolah negeri sekolah dengan sekolah swasta berbeda. Untuk sekolah negeri tidak terbebani biaya gaji guru dan karyawan, karena sudah dibayar oleh Negara lewat gaji, sedangkan untuk sekolah swasta masih

mempunyai beban untuk menggaji guru dan karyawan, terutama guru dan karyawan honorer.

Kebijakan Bupati Karanganyar tentang pendidikan gratis, merupakan kebijakan baru untuk wilayah kabupaten Karanganyar. Sehingga dalam mengimplementasikannya masih banyak terjadi perbedaan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, terutama antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Untuk sekolah negeri di Kabupaten Karanganyar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sekolah reguler dan sekolah ex Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Realitas sekolah RSBI membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi dari pada sekolah reguler, karena fasilitas yang diberikan oleh sekolah RSBI juga lebih baik daripada sekolah reguler, hal ini bisa dilihat besarnya sumbangan bantuan/SPP dari orangtua/wali siswa.

SMK Negeri 2 Karanganyar merupakan sekolah ex RSBI yang berada di Kabupaten Karanganyar. Sebagai sekolah ex RSBI SMK Negeri 2 Karanganyar membutuhkan dana operasional yang cukup besar. Dengan kebijakan Bupati Karanganyar program sekolah gratis, sekolah-sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada orang tua/wali murid. Dengan demikian, sumber dana sekolah dari masyarakat (orang tua/wali siswa) ditiadakan. Sebagai sekolah negeri dan ex sekolah RSBI, SMK Negeri 2 Karanganyar tidak diperbolehkan memungut biaya dari orang tua/wali siswa, sedang menurut hasil penelitian

Supriadi (2010), untuk SMK Negeri 68 % biaya sekolah adalah dari orangtua/wali siswa. Hal ini, menurut peneliti sangat menarik untuk diteliti mengenai pembiayaan di SMK Negeri 2 Karanganyar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, fokus penelitian ini adalah " Bagaimana Pengelolaan Biaya sekolah Gratis di SMK Negeri 2 Karanganyar ?" dari fokus penelitian tersebut dirinci menjadi empat sub-fokus (rumusan masalah) :

1. Bagaimana pengelolaan sumber dana sekolah gratis di SMK Negeri 2 Karanganyar ?
2. Bagaimana pengalokasian dana sekolah gratis di SMK Negeri 2 Karanganyar ?
3. Bagaimana penggunaan/pendistribusian dana sekolah gratis di SMK Negeri 2 Karanganyar ?
4. Bagaimana akuntabilitas dana sekolah gratis di SMK Negeri 2 Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan pembiayaan pendidikan gratis di SMK Negeri 2 Karanganyar. Pengelolaan pembiayaan sekolah gratis tempat penelitian, diidentifikasi, digambarkan, dikaji secara induktif untuk pemahaman makna dan pengembangan konsep.

Sedangkan secara khusus penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengkaji (1) Pengelolaan sumber-sumber dana sekolah gratis di SMK Negeri 2 Karanganyar , (2) Pengalokasian/penjabaran dana pada RAPBS sekolah gratis di SMK Negeri 2 Karanganyar, (3) Penggunaan/pendistribusian dana sekolah gratis di SMK Negeri 2 Karanganyar, dan (4) Akuntabilitas dana sekolah gratis di SMK Negeri 2 Karanganyar

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberi sumbangan konseptual, utamanya kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan sekolah gratis. Disamping itu, hasil penelitian ini juga akan memberi sumbangan substansial kepada pemerintah daerah yang menyelenggarakan pendidikan gratis.

1. Manfaat Teoritis

Secara umum, hasil penelitian ini memberikan sumbangan kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan sekolah gratis. Sehingga pelaksanaan sekolah gratis di sekolah-sekolah Karanganyar relatif sama, khususnya yang memiliki karakter/kekhasan yang sama.

Sedangkan secara khusus, hasil penelitian ini menyumbangkan alternatif cara pengelolaan pembiayaan sekolah gratis, sehingga pengelolaan pembiayaan sekolah gratis bisa efektif dan efisien serta akuntabel.

2. Manfaat Praktis

Segi praktis, hasil penelitian ini memberi sumbangan kepada sekolah pelaksana sekolah gratis di Kabupaten Karanganyar. Disamping itu hasil penelitian ini bisa sebagai bahan referensi untuk peneliti yang lain, yang meneliti tentang pendanaan pendidikan. Hasil penelitian ini juga sebagai informasi untuk masyarakat (orang tua/wali siswa), sebagai dasar dalam berpartisipasi dalam pendidikan